

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara dengan setiap wilayahnya terbagi atas daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota. Pada setiap daerahnya mempunyai sistem pemerintahan yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya masing – masing menurut asas otonomi dan tugas pokoknya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat BAPPEDA adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.

Provinsi Jawa Barat memulai pembangunan dengan berawal dari BAPEMKO yang merupakan Badan Perencanaan pertama di Indonesia yang bersifat regional dan lokal yang ditetapkan dengan SK Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 43 tahun 1972. Setelah berjalan selama 2 tahun kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah baru dikukuhkan dan diakui dengan SK Presiden No. 15 Tahun 1974 untuk Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, sedangkan untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II, SK Gubernur masih tetap berlaku. Surat Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980 mempertegas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II diakui secara Nasional, dengan SK Presiden tersebut lahirlah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II atau BAPPEDA Tingkat II. Pertimbangan yang mendasari terbitnya SK Presiden No. 27 tahun 1980 pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BAPPEDA pada Jawa Barat didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 tahun 2000

tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat. Peraturan tersebut jugalah yang akhirnya mengubah dari BAPEDA Tingkat I Jawa Barat (Badan Perencanaan Daerah) Provinsi Jawa Barat menjadi BAPPEDA Provinsi Jawa Barat (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat).

1.2 Tema Perancangan

Arsitektur tradisional Menurut Amos Rapoport (1960), merupakan bentukan arsitektur yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mempelajari bangunan tradisional berarti mempelajari tradisi masyarakat yang lebih dari sekadar tradisi membangun secara fisik. Masyarakat tradisional terikat dengan adat yang menjadi konsesi dalam hidup bersama.

Perubahan selalu terjadi pada manusia di muka bumi manapun. Proses ini sangat alamiah. Perubahan cepat di segala bidang akibat pesatnya kemajuan teknologi dan informasi mendorong terjadinya transformasi dari masyarakat industri menjadi masyarakat informasi dan ilmu pengetahuan. Fenomena tersebut merupakan salah satu dampak dari proses globalisasi, yang mana membuat suatu perubahan yang signifikan di negara manapun.

Arsitektur sebagai salah satu unsur kebudayaan tidak luput dari tekanan perubahan. Arsitektur modern yang dominan hanya berlandas pada efisiensi dan efektivitas industri telah cukup lama mempertanyakan kemampuannya menghadapi perubahan zaman. Arsitektur posmodern kemudian muncul menjawab dan menyikapi perubahan zaman yang terjadi sangat cepat. Arsitektur posmodern tidak dapat dikatakan seluruhnya kontra dan menihilkan arsitektur modern, tetapi berkembang memunculkan dua arus besar pemikiran, pertama cenderung (re)konstruktif, kedua cenderung dekonstruktif. Perkembangan ini sejalan dengan pemikiran ilmu pengetahuan yang mendapatkan inspirasi dari filsafat. Arsitektur posmodern yakin bahwa univalensi harus diganti dengan multivalensi (keberagaman), dengan ciri lokal justru wajib dikembangkan dan mulai dijadikan landasan penciptaan. Reaksi terhadap globalisasi dalam arsitektur ditandai dengan munculnya ketertarikan pada ciri-ciri lokal, yang dahulu tersingkir dari wacana arsitektur modern. Para praktisi dan teoretisi mulai menoleh pada elemen lokal yang

dianggap unik, spesifik, dan dapat memberikan keragaman 'warna'. Dengan mengangkat pengetahuan lokal dan kesejarahan yang telah teruji zaman, diharapkan identitas lokal tidak akan begitu mudah tersapu oleh gelombang globalisasi.

1.3 Tujuan Proyek

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum perencanaan bangunan pemerintahan ini adalah menciptakan fasilitas untuk para pekerja pemerintahan.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a) Menciptakan ruang untuk semua aktifitas pemerintahan yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan untuk suatu daerah
- b) Menciptakan bangunan sebagai salah satu destinasi pariwisata
- c) Menciptakan bangunan dengan warna kebudayaan setempat sebagai citra dan representatif dari daerah yang bersangkutan.

1.4 Misi Proyek

Misi proyek gedung pemerintahan ini adalah sebagai berikut :

- a) Membuat perancangan dengan dasar kebudayaan yaitu arsitektur tradisional sunda sebagai acuan dasar untuk membangun citra dan warna pada bangunan.
- b) Menciptakan kenyamanan baik secara psikis maupun fisik sebagai apresiasi terhadap kesehatan dan sosial sebagai sesama makhluk hidup, dengan konsep *open plan* dan *green building system*.
- c) Menciptakan fasilitas yang menunjang semua pekerjaan aparatur sipil negara.

1.5 Data Proyek

Nama bangunan : BAPPEDA Jawa Barat
 Fungsi bangunan : Bangunan Pemerintah
 Sifat proyek : Fiktif
 Owner : Negara

Lokasi	: Jl. Insinyur H. Djuanda No.287, Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40135
Luas lahan	: ±9100 m ²
KDB	: 40% (berdasarkan DISTARU Kota Bandung)
GSB	: minimum 10 meter
KLB	: 1,6 (berdasarkan DISTARU Kota Bandung)
KDH minimum	: 52% (berdasarkan DISTARU Kota Bandung)

1.6 Identifikasi Masalah

1.6.1 Aspek Perancangan

- a) Memperkuat desain yang sudah ada yaitu tentang ciri khas tradisional sunda
- b) Memperkuat penciptaan ikon bangunan khas tradisional sunda
- c) Menambahkan keefektifan ruang untuk aktifitas pemerintahan.

1.6.2 Aspek Bangunan dan Struktural

- a) Memperkuat konsep desain yang sudah ada dengan lebih memperlihatkan citra khas tradisional sunda sebagai identitas dan karakter bangunan
- b) Pemberdayaan material struktur bangunan yang sesuai dengan peraturan yang ada dengan memperhatikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna bangunan

1.6.3 Aspek Lingkungan dan Tapak

Memperkuat desain dengan lebih menyikapi permasalahan serta potensi yang ada pada tapak maupun lingkungan dengan iklim tropis

1.7 Metoda Pendekatan Perancangan

Metoda pendekatan perancangan untuk penyikapan dan penyelesaian sebagai berikut :

- a) Memahami perilaku dan aktifitas dari sasaran pengguna bangunan

- b) Memahami kondisi kawasan tapak sehingga dapat mengetahui kendala dan potensi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperoleh solusi desain yang terbaik
- c) Penerapan *zoning* yang didasarkan pengelompokan aktifitas pengguna
- d) Menerapkan arsitektur tradisional sunda kedalam desain sebagai bukti tentang khazanah kearifan lokal daerah yang berkualitas.

Metoda yang digunakan dalam perencanaan dan perancangan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan mengumpulkan, menganalisis dan menyimpulkan data yang diperlukan dan berkaitan dengan masalah. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder.

a) Data Primer :

- 1) Wawancara dengan narasumber terkait
- 2) Studi lapangan/ observasi lapangan
- 3) Studi banding, dengan mempelajari bangunan lain yang kurang lebih memiliki jenis fungsi yang sama.

b) Data Sekunder :

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari buku – buku yang berkaitan dengan teori, konsep, standar perencanaan dan perancangan arsitektur tradisional sunda.

1.8 Skema Pemikiran

Skema pemikiran proses perancangan bangunan pemerintah ini dijelaskan pada

Gambar 1. 1.



Gambar 1. 1 Skema Pemikiran

1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada laporan perancangan tugas akhir arsitektur ini dibagi menjadi beberapa bab. Masing-masing bab membahas bagian tertentu dari keseluruhan isi laporan berdasarkan jenis bahannya dan berdasarkan proses pengerjaan proyek tugas akhir ini. Adapun pembagiannya yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang proyek dan lokasi, tema perancangan, tujuan proyek, misi proyek, detugas akhir proyek, identifikasi masalah, metoda pendekatan perancangan, skema pemikiran, dan sistematika pembahasan untuk mencapai hasil rancangan.

BAB II TINJAUAN PROYEK DAN STUDI BANDING

Menguraikan mengenai tinjauan proyek secara umum dan khusus serta studi banding mengenai bangunan pemerintahan

BAB III ANALISIS TAPAK DAN PROGRAM PERANCANGAN

Menguraikan tentang tinjauan kawasan perencanaan proyek diantaranya adalah lokasi, data proyek, tinjauan lokasi, kondisi lingkungan, analisis tapak dan uraian mengenai program ruang dalam perancangan bangunan pemerintahan BAPPEDA Jawa Barat ini berdasarkan hasil analisis.

BAB IV KONSEP PERANCANGAN

Menguraikan konsep awal perancangan yang dilengkapi dengan penjelasan tema dan konsep bangunan terkait arsitektural, struktural, serta utilitas.

BAB V HASIL RANCANGAN DAN METODA MEMBANGUN

Menguraikan tentang tahapan metoda membangun yang terdiri dari tahap persiapan, *sub* struktur, *upper* struktur, pemasangan utilitas, dan tahap *finishing*.